



SESUAI AMANAT INPRES

Kemiskinan Ekstrem di DIY Harus Selesai 2024

YOGYA (KR) - Permasalahan kemiskinan ekstrem di DIY harus diselesaikan tahun 2024. Ini sesuai dengan amanat Inpres No 4 Tahun 2022 tentang percepatan penurunan kemiskinan ekstrem.

Penurunan tersebut berbasis 3 langkah. Pertama, penurunan beban dengan program program charity seperti KIP, bansos, BPJS dan lain sebagainya. Kedua, melalui peningkatan pendapatan berupa berbagai program pemberdayaan. Terakhir dengan meminimalkan kantung kemiskinan.

"Roadmap penurunan angka ini harus sangat serius kita jalankan. Karena tinggal waktu 1 tahun lagi sesuai amanah inpres," kata Wakil Ketua DPRD DIY Huda Tri Yudiana, Jumat (9/6).

Kemiskinan di DIY ter-

masuk tinggi, 11,49 persen. Di dalamnya terdapat kemiskinan ekstrem 1,08 persen. Dalam hal kemiskinan ekstrem, DIY di bawah rata rata nasional, yakni 1,74 persen. DIY 1,08 persen dan paling rendah di Pulau Jawa. Sedangkan paling tinggi Jawa Tengah.

"Kita bersyukur kemiskinan ekstrem di DIY paling rendah di Pulau Jawa dengan presentase 1.08 persen atau setara dengan sekitar 43 ribu warga. Dengan didorong serius kita yakin, di- 2024 DIY bisa mencapai target nol persen," jelasnya.

Angka kemiskinan ek-

strem ini menurut Huda menunjukkan langkah penanganan kemiskinan di DIY sudah *on the track*. Karena penanganan kemiskinannya cukup baik, jika konsisten dilakukan pihaknya yakin sebentar lagi ada penurunan angka kemiskinan drastis di DIY beberapa tahun lagi.

Huda menambahkan, alokasi anggaran DIY juga perlu ditingkatkan. Terutama kabupaten/kota yang masih mengalokasikan APBD untuk kemiskinan ekstrem di bawah 4 persen. Untuk DIY tahun 2023 sebesar 7.98 persen naik dibanding tahun lalu sebesar 6.66 persen. Sedangkan kabupaten kota 3 persen, bahkan ada yang 1.7 persen saja padahal di daerahnya banyak yang miskin ekstrem.

Program-program bisa di-

fokuskan pada data kemiskinan ekstrem P3KE di mana Pemda DIY sudah ada data *by name by address*-nya. Sehingga bisa tepat sasaran dan model penanganannya.

Penanganan kemiskinan ekstrem juga perlu memperhatikan penanganan kemiskinan secara umum dengan konsisten.

"Saat ini DPRD DIY sedang intens koordinasi dan konsultasi dengan stakeholder termasuk Kementerian PMK. Kami minta alat kelengkapan DPRD DIY juga segera berkoordinasi dengan mitra terkait untuk memastikan target 2024 kemiskinan ekstrem nol persen ini tercapai. Daerah-daerah kantong kemiskinan ekstrem harus menjadi prioritas utama, di kabupaten Gunungkidul dan Kulonprogo," jelasnya. **(Awh)-f**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 15 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005